

**KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS
DALAM PENGENDALIAN LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK DI KELURAHAN
SEKIP JAYA KECAMATAN KEMUNING KOTA PALEMBANG SUMATERA
SELATAN**

Tri Ramadhan Heliansyah

NPP. 31.0248

Asdaf Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan

Program Studi Studi Kebijakan Publik

Email: triheliansyah@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Cut Laila Karmila, S.Sos, MA.

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): This research discusses the Implementation of Government Policy on Quality Family Villages in Sekip Jaya Sub-district in controlling population growth rate, where in 2021 there were 12,868 people, in 2022 there were 14,466 people, and in 2022 Sekip Jaya Sub-district ranked third with the highest population among the 6 sub-districts in Kemuning District, Palembang City. **Purpose:** The aim of this research is to understand the Implementation of Government Policy on Quality Family Villages in Sekip Jaya Sub-district, to identify the factors hindering the implementation of the Government Policy on Quality Family Villages in Sekip Jaya Sub-district, and to determine the efforts made by the Palembang City Government in addressing the hindering factors in the implementation of the Government Policy on Quality Family Villages in Sekip Jaya Sub-district. **Method:** This research employs a descriptive qualitative research method utilizing the Edward III Theory. Data collection techniques include interviews, observation, and document analysis. **Result:** The findings obtained by the author in this research are based on Edward III Theory, where factors such as communication, resources, disposition, and bureaucratic structure have been implemented effectively. However, two hindering factors were identified. **Conclusion:** The implementation of the Government Policy on Quality Family Villages in controlling population growth rate in Sekip Jaya Sub-district, Kemuning District, Palembang City, South Sumatra, has been carried out effectively. However, there are hindering factors in the implementation of the Government Policy on Quality Family Villages in controlling population growth rate in Sekip Jaya Sub-district, Kemuning District, Palembang City, South Sumatra. These include the lack of specific budget allocation for the implementation of Quality Family Villages and incomplete support from the community for Quality Family Villages. To address these hindering factors, the Palembang City Government is actively seeking CSR funding and intensifying its socialization efforts.

Keywords: Policy Implementation; Quality Family Village; Population

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini membahas tentang Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Kampung Keluarga Berkualitas di Kelurahan Sekip Jaya dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk dimana pada tahun 2021 sebanyak 12.868 jiwa, tahun 2022 sebanyak 14.466 jiwa serta pada tahun 2022 Kelurahan Sekip Jaya menempati urutan ke-3 dengan jumlah penduduk terbanyak dari 6 kelurahan yang ada di Kecamatan Kemuning Kota Palembang. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Kampung Keluarga Berkualitas di Kelurahan Sekip Jaya, mengetahui faktor yang menjadi penghambat dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Kampung Keluarga Berkualitas di Kelurahan Sekip Jaya, serta

mengetahui upaya apa saja yang dilakukan Pemerintah Kota Palembang dalam mengatasi faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Kampung Keluarga Berkualitas di Kelurahan Sekip Jaya. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan Teori Edward III. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumen. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini adalah berdasarkan Teori Edward III faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi telah baik dilaksanakan hanya saja ditemukan dua faktor penghambat. **Kesimpulan:** Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Kampung Keluarga Berkualitas Dalam Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk di Kelurahan Sekip Jaya Kecamatan Kemuning Kota Palembang Sumatera Selatan sudah dijalankan dengan baik. Terdapat faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Kampung Keluarga Berkualitas Dalam Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk di Kelurahan Sekip Jaya Kecamatan Kemuning Kota Palembang Sumatera Selatan, yaitu tidak adanya anggaran khusus untuk pelaksanaan Kampung Keluarga Berkualitas dan masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung Kampung Keluarga Berkualitas. Dalam mengatasi faktor penghambat tersebut, Pemerintah Kota Palembang melakukan pencarian dana CSR dan menggiatkan sosialisasi lebih aktif.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan; Kampung Keluarga Berkualitas; Penduduk

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam beberapa tahun terakhir populasi penduduk Tanah Air terus meningkat. Pertengahan tahun 2020, jumlah penduduk Indonesia adalah 270,20 juta. Hal ini meningkat menjadi 272,68 juta pada pertengahan 2021 dan mencapai 275,77 juta pada pertengahan 2022, dimana mengalami peningkatan 1,13% dibandingkan dengan periode 2021. Populasi penduduk Indonesia meningkat sebagai akibat dari angka kelahiran yang terus meningkat. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya, salah satunya dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Undang-Undang ini merupakan upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga dan peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera. Saat ini program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga masih menjadi perhatian dan komitmen Pemerintah Republik Indonesia sehingga program ini masih tercantum dan diamanatkan pula dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Pertumbuhan penduduk merupakan permasalahan yang harus diatasi melalui kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan partisipasi pemerintah daerah dalam pelaksanaan program Kependudukan dan Keluarga Berencana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Menurut Pasal 12 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah salah satu layanan yang harus disediakan oleh pemerintah daerah. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) membuat Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kecana) dimana BKKBN berkontribusi terhadap Pembangunan Keluarga; Kependudukan; dan Keluarga Berencana. Maka dari itu, BKKBN membuat program Kampung Keluarga Berkualitas. Hal ini didukung dengan Pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas. Instruksi Presiden ini ditujukan kepada sejumlah menteri dan kepala lembaga serta seluruh gubernur, bupati, dan

wali kota di seluruh Indonesia.

Secara umum, tujuan dari Kampung Keluarga Berkualitas ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia di tingkat kampung atau setara yang dicapai melalui pembangunan sektor terkait dan program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga. Tujuan khusus Kampung Keluarga Berkualitas ini adalah meningkatkan peran pemerintah, lembaga non kementerian, dan swasta dalam mendukung, mendampingi, dan membangun program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan sektor terkait. Dan juga meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pembangunan berwawasan kependudukan. Kampung KB memiliki serangkaian kegiatan diantaranya adalah peningkatan ketahanan keluarga melalui program Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), dan Pusat Informasi dan Konseling (PIK) remaja, pemberdayaan keluarga melalui kelompok UPPKS, meningkatkan sarana dan prasarana pembangunan kampung dan meningkatkan sanitasi dan lingkungan kampung yang sehat dan bersih.

Provinsi Sumatera Selatan berada di urutan ke sembilan dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 94,44 per Km². Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang mempunyai luas wilayah 86.771,68 km², dengan jumlah penduduk sebesar 8.550.849 jiwa pada tahun 2022. Salah satu daerah di Sumatera Selatan dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Kota Palembang, dengan jumlah penduduk sebanyak 1.707.996 jiwa pada tahun 2022. Program Kampung Keluarga Berkualitas terus dikembangkan di setiap wilayah di Indonesia termasuk wilayah Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatera Selatan tepatnya di Kelurahan Sekip Jaya Kecamatan Kemuning Kota Palembang Sumatera Selatan. Kelurahan Sekip Jaya memiliki jumlah penduduk yang terus berkembang dari tahun ke tahun. Sesuai data statistik, jumlah penduduk Kelurahan Sekip Jaya pada tahun 2021 sebanyak 12.868 jiwa, yang kemudian meningkat pada tahun 2022 menjadi 14.466 jiwa. Berdasarkan data kependudukan, peningkatan jumlah penduduk dalam kurun waktu 2021 hingga 2022 sejumlah 1.598 jiwa.

1.2. Kesenjangan Masalah Yang Diambil

Berdasarkan data yang ada dimana pertumbuhan penduduk di Kelurahan Sekip Jaya pada tahun 2021 sebanyak 12.868 jiwa, yang kemudian meningkat pada tahun 2022 menjadi 14.466 jiwa. Berdasarkan data kependudukan, peningkatan jumlah penduduk dalam kurun waktu 2021 hingga 2022 sejumlah 1.598 jiwa. Angka ini sangat signifikan mengingat beban penduduk yang besar untuk dapat memenuhi kebutuhan pelayanan publik bagi penduduk yang makin bertambah. Direncanakan bahwa Kampung Keluarga Berkualitas di Kelurahan Sekip Jaya ini akan berfungsi sebagai model untuk pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan contoh bagi kampung-kampung lain di Kecamatan Kemuning Kota Palembang, Sumatera Selatan. Seiring berjalannya Program Kampung Keluarga Berkualitas di Kelurahan Sekip Jaya Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan ini proses administratif tidak efisien karena partisipasi warga yang rendah dalam Keluarga Berencana (KB) dan kekurangan sarana dan prasarana sehingga proses administratif tidak efisien. Selain itu, *data base* sulit diakses oleh masyarakat, masih terbatasnya sumber daya manusia dalam menggerakkan program Kampung KB, partisipasi masyarakat di Kelurahan Sekip Jaya belum optimal, serta Pemerintah Kota Palembang yang kurang menjalankan fungsi pengawasan dan evaluasi Program Kampung KB ini.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks Implementasi Kampung Keluarga Berencana dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat maupun konteks pemberdayaan masyarakat. Penelitian Eveline Ramadhiani berjudul Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana (KB) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Kelurahan Kebayoran Lama Utara (Studi Kasus Kampung KB

RPTRA Delas) (Eveline Ramadhiani, 2022) menemukan bahwa Implementasi Program Kampung KB RPTRA Delas masih dinilai belum optimal dengan kata lain Kampung KB RPTRA Delas masih berada dalam kategori dasar yang artinya belum berkembang. Namun, Kampung KB RPTRA Delas memberikan dampak baik yaitu meningkatnya kesejahteraan keluarga bagi penerima manfaat program. Penelitian Riski Hoeriah berjudul Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana (KB) di Kampung Kaliwadas Kelurahan Lopang Kecamatan Serang Kota Serang Provinsi Banten (Riski Hoeriah, 2019) menemukan bahwa Implementasi Program Kampung KB di Kampung Kaliwadas belum berjalan secara optimal karena pengurus kampung KB yang kurang aktif dan inisiatif dalam membuat kegiatan untuk poktan, sarana dan prasarana yang kurang memadai, juga kurangnya koordinasi dan dukungan dari lintas sektor. Penelitian Jumadi Syawal berjudul Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana (KB) Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat di Desa Koto Ranah Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu (Jumadi Syawal, 2019) menemukan bahwa faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk dapat mengikuti program Kampung KB di Desa Koto Ranah melainkan untuk dapat merasakan pemberdayaan keluarga yang produktif serta melahirkan keluarga yang sejahtera dari terpenuhinya pendidikan, ekonomi, layanan kesehatan, dan perlindungan. Hal ini tidak terlepas dari partisipasi seluruh lapisan masyarakat yang terlibat di Desa Koto Ranah.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Kampung Keluarga Berkualitas Dalam Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk di Kelurahan Sekip Jaya Kecamatan Kemuning Kota Palembang Sumatera Selatan menggunakan Teori Edward III, dimana penelitian ini fokus dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk serta penelitian ini dilakukan setelah adanya perubahan nama dari Kampung Keluarga Berencana menjadi Kampung Keluarga Berkualitas.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Kampung Keluarga Berkualitas Dalam Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk di Kelurahan Sekip Jaya Kecamatan Kemuning Kota Palembang Sumatera Selatan, faktor penghambat serta upaya Pemerintah Kota Palembang dalam mengatasi masalah pada Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Kampung Keluarga Berkualitas Dalam Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk di Kelurahan Sekip Jaya Kecamatan Kemuning Kota Palembang Sumatera Selatan.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dimana pendekatan ini tepat digunakan dalam penelitian ini untuk mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Kampung Keluarga Berkualitas Dalam Pengendalian Penduduk di Kelurahan Sekip Jaya Kecamatan Kemuning Kota Palembang Sumatera Selatan. Pendekatan kualitatif guna memahami fenomena secara holistik dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2007). Sedangkan metode penulisan deskriptif yaitu penulisan yang memiliki fungsi untuk menganalisa data dengan menggambarkan data yang sudah terkumpul sebagaimana adanya dengan tidak bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2008:206).

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumen (Sugiyono, 2017:203). Dalam mengumpulkan data kualitatif, penulis melakukan wawancara terhadap 13

orang informan yang terdiri dari Lurah Sekip Jaya, Ketua Kampung KB Sekip Jaya, Petugas BKKBN Kecamatan Kemuning, Petugas Puskesmas Sekip Jaya, Petugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Palembang, Petugas Dinas Sosial Kota Palembang, Petugas BKKBN Kota Palembang, Ketua Rumah Data Kependudukan Kampung KB Sekip Jaya, dan 5 orang masyarakat. Kemudian penulis melakukan analisis menggunakan reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan (Miles & Huberman dalam Sugiyono, 2011:91).

Penulis juga menggunakan Triangulasi, dimana Triangulasi ialah sebuah teknik pengumpulan data dengan menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang sudah ada sebelumnya (Simangunsong, 2016:224). Penulis menggabungkan teknik yang penulis pakai, yaitu wawancara, observasi, dan dokumen agar data yang diperoleh lebih akurat, konsisten, atau pasti sekaligus menguji kredibilitas data.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis dan mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Kampung Keluarga Berkualitas Dalam Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk di Kelurahan Sekip Jaya Kecamatan Kemuning Kota Palembang Sumatera Selatan menggunakan Teori Edward III dengan 4 faktor, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

3.1. Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Kampung Keluarga Berkualitas Dalam Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk di Kelurahan Sekip Jaya Kecamatan Kemuning Kota Palembang Sumatera Selatan

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas dalam mewujudkan program Kependudukan dan Keluarga Berencana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 maka penulis melakukan penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Kampung Keluarga Berkualitas Dalam Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk di Kelurahan Sekip Jaya Kecamatan Kemuning Kota Palembang Sumatera Selatan. Penulis melakukan penelitian menggunakan Teori Konsep Implementasi Kebijakan menurut Edward III dalam Nugroho (2009:636). George C. Edward menyebutkan bahwa dalam implementasi kebijakan terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Oleh karena itu, penulis menerapkan teori Edward III yang terdiri dari 4 faktor dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Kampung Keluarga Berkualitas Dalam Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk di Kelurahan Sekip Jaya Kecamatan Kemuning Kota Palembang Sumatera Selatan.

1. Faktor Komunikasi

Menurut Edward III, pada faktor komunikasi terdapat 3 sub faktor yang mempengaruhi komunikasi tersebut berjalan dengan lancar dan efektif, yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi.

1. Transmisi

Menurut Edward III, transmisi merupakan persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif, yaitu bahwa para pelaksana kebijakan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Penulis pada sub-faktor ini melakukan wawancara terhadap Lurah Sekip Jaya dan Petugas BKKBN Kecamatan Kemuning dimana hasilnya adalah sosialisasi sebagai upaya transmisi dalam komunikasi terhadap pihak terkait dalam implementasi kebijakan Kampung KB telah berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil dari sosialisasi, masyarakat telah memahami maksud dan tujuan kebijakan ini sehingga masyarakat mendukung pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan membuat agar SDM di Kelurahan Sekip Jaya lebih berkualitas.

2. Kejelasan

Kejelasan yang dimaksud dalam hal ini adalah tersampainya informasi mengenai kebijakan secara jelas dan detail terhadap masyarakat. Jika suatu kebijakan dapat berjalan dengan sebagaimana yang diinginkan, maka komunikasi dalam hal penyampaian kebijakan harus jelas. Pada sub-faktor ini penulis melakukan wawancara kepada Lurah Sekip Jaya, Ketua Rumah Data Kependudukan Kampung KB Sekip Jaya, dan masyarakat dimana menunjukkan bahwa komunikasi yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dan tersampaikan dengan jelas sehingga masyarakat memahami dan siap melaksanakan Kebijakan Kampung Keluarga Berkualitas dalam Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk di Kelurahan Sekip Jaya Kecamatan Kemuning Kota Palembang Sumatera Selatan.

3. Konsistensi

Sesuai dengan Teori Edward III dalam Winarno (2016), apabila implementasi kebijakan ingin berjalan dengan efektif maka harus dilaksanakan secara konsisten sehingga maksud dan tujuan kebijakan tersebut dapat dicapai. Pada sub-faktor ini penulis melakukan wawancara kepada Lurah Sekip Jaya dan Petugas BKKBN Kecamatan Kemuning dimana Kelurahan Sekip Jaya beserta jajaran pelaksana Kebijakan Kampung KB melakukan komunikasi dan koordinasi yang konsisten dalam Implementasi Kebijakan Kampung Keluarga Berkualitas dalam Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk di Kelurahan Sekip Jaya Kecamatan Kemuning Kota Palembang Sumatera Selatan.

2. Faktor Sumber Daya

Di dalam faktor sumber daya, menurut Edward III ditentukan oleh empat sub faktor, yaitu staf, informasi, wewenang, dan fasilitas. Empat sub faktor tersebut apabila sudah terlaksana maka faktor sumber daya berhasil dilaksanakan.

1. Staf

Staf merupakan sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemerintah sebagai pelaksana kebijakan yang berperan untuk melakukan dan memberikan pelayanan. Pada sub-faktor ini penulis melakukan wawancara terhadap Lurah Sekip Jaya dimana menunjukkan bahwa dalam proses pemilihan sumber daya manusia untuk mendukung Kampung Keluarga Berkualitas ini dilakukan sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan sehingga program Kampung Keluarga Berkualitas di Kelurahan Sekip Jaya dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

2. Informasi

Informasi merupakan langkah awal bagi pelaksana kebijakan dalam menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan pada masa yang akan datang untuk mengatasi segala yang terjadi dalam implementasi kebijakan. Pada sub-faktor ini penulis melakukan wawancara terhadap Lurah Sekip Jaya, Petugas BKKBN Kota Palembang, dan masyarakat dimana menunjukkan terkait informasi mengenai Kebijakan Kampung Keluarga Berkualitas ini selalu disampaikan dengan cepat dan jelas sehingga tidak ada masyarakat yang terlambat mengetahui informasi tersebut.

3. Wewenang

Kewenangan pada umumnya wajib memiliki sifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Pada sub-faktor ini penulis melakukan wawancara terhadap Petugas BKKBN Kota Palembang dan Lurah Sekip Jaya bahwa dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Kampung Keluarga Berkualitas dalam Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk di Kelurahan Sekip Jaya Kecamatan Kemuning Kota Palembang Sumatera Selatan diberikan kewenangan yang penuh kepada Kelurahan Sekip Jaya dalam mengendalikan dan menjalankan Kampung Keluarga Berkualitas sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah dibagi.

4. Fasilitas

Fasilitas itu sendiri terdiri dari sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam menjalankan suatu kebijakan. Pada sub-faktor ini penulis melakukan wawancara terhadap Lurah Sekip Jaya bahwa bahwa fasilitas yang diberikan sudah mampu untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Kampung Keluarga Berkualitas. Fasilitas yang dibutuhkan juga lebih mengarah ke fasilitasi oleh BKKBN dalam membina dan memberikan edukasi kepada masyarakat Kelurahan Sekip Jaya.

3. Faktor Disposisi

Dalam faktor disposisi ini terdapat dua sub faktor yang mendukung berhasilnya proses disposisi, yaitu pengangkatan birokrat dan insentif.

1. Pengangkatan Birokrat

Dalam pengangkatan birokrat, disposisi pelaksana kebijakan akan menentukan terhadap implementasi suatu kebijakan. Pada sub-faktor ini penulis melakukan wawancara kepada Lurah Sekip Jaya dan Petugas BKKBN Kota Palembang bahwa pengangkatan birokrat baik dari Kelurahan Sekip Jaya, masyarakat, dan pihak terkait dilakukan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang ditentukan sehingga dapat dipastikan bahwa petugas Kampung Keluarga Berkualitas sudah sesuai dengan kualitas yang dimiliki.

2. Insentif

Edward III menyatakan bahwa salah satu upaya yang mampu mengatasi permasalahan oleh para pelaksana kebijakan dengan melakukan pemberian insentif. Penulis melakukan wawancara terhadap Petugas BKKBN Kota Palembang dan Lurah Sekip Jaya bahwa BKKBN Pusat maupun Provinsi dan Kota tidak memberikan insentif akan tetapi memberikan bentuk penghargaan melalui lomba-lomba yang diadakan sehingga tetap mampu memberikan semangat kepada para pelaksana kebijakan dan masyarakat.

4. Faktor Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi itu sendiri dipengaruhi oleh dua sub faktor, yaitu membuat *standar operating procedures* (SOP) dan melakukan fragmentasi.

1. *Standar Operating Procedures* (SOP)

Standar Operating Procedures (SOP) merupakan standar pelaksanaan yang dibuat untuk dilakukan secara rutin oleh sumber daya manusia, yaitu pelaksana, sasaran, dan pihak pendukung kebijakan Kampung Keluarga Berkualitas. Pada sub-faktor ini penulis melakukan wawancara kepada Lurah Sekip Jaya bahwa bahwa SOP Kampung Keluarga Berkualitas telah diimplementasikan dan dijelaskan kepada masyarakat Kelurahan Sekip Jaya. Dan juga seluruh pihak yang terlibat dalam Kampung KB ini telah menjalankan sesuai SOP yang ada.

2. Melakukan Fragmentasi

Fragmentasi adalah pembagian tanggung jawab kegiatan maupun tugas terhadap beberapa unit atau seksi yang ada dalam menerapkan kebijakan tersebut. Pada sub-faktor ini penulis melakukan wawancara kepada Ketua Kampung KB Sekip Jaya dan Lurah Sekip Jaya dimana fragmentasi dalam hal ini pembagian tanggung jawab telah dilakukan dengan seksi yang ada dan sesuai dengan seksi tersebut sehingga tidak adanya tanggung jawab yang tidak sesuai terhadap masing-masing seksi. Oleh karena itu, dengan telah dilakukannya fragmentasi dapat mendukung efektifnya kebijakan tersebut.

3.2. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Kampung Keluarga Berkualitas Dalam Pengendalian Penduduk di Kelurahan Sekip Jaya Kecamatan Kemuning Kota Palembang Sumatera Selatan

Dalam penelitian yang peneliti lakukan, peneliti menemukan faktor yang menghambat dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Kampung Keluarga Berkualitas Dalam Pengendalian Penduduk di Kelurahan Sekip Jaya Kecamatan Kemuning Kota Palembang Sumatera Selatan, yaitu tidak adanya anggaran khusus dan masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung Kampung Keluarga Berkualitas.

3.3. Upaya Pemerintah Kota Palembang Dalam Mengatasi Masalah pada Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Kampung Keluarga Berkualitas Dalam Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk di Kelurahan Sekip Jaya Kecamatan Kemuning Kota Palembang Sumatera Selatan

Tentunya dalam mengatasi faktor penghambat yang ada dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Kampung Keluarga Berkualitas Dalam Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk di Kelurahan Sekip Jaya Kecamatan Kemuning Kota Palembang Sumatera Selatan, adanya upaya dari Pemerintah Kota Palembang, yaitu mencari dana CSR dan menggiatkan sosialisasi lebih aktif.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada penelitian Eveline Ramadhiani berjudul Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana (KB) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Kelurahan Kebayoran Lama Utara (Studi Kasus Kampung KB RPTRA Delas) (Eveline Ramadhiani, 2022) bertujuan untuk menjelaskan bagaimana unsur-unsur dan indikator keberhasilan pada Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana (KB) RPTRA Delas Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Kelurahan Kebayoran Lama Utara. Pada penelitian Riski Hoeriah berjudul Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana (KB) di Kampung Kaliwadas Kelurahan Lopang Kecamatan Serang Kota Serang Provinsi Banten (Riski Hoeriah, 2019) bertujuan untuk mengetahui, mendapatkan gambaran jelas dan menganalisis mengenai Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana (KB) di Kampung Kaliwadas Kelurahan Lopang Kecamatan Serang Kota Serang Provinsi Banten. Pada penelitian Jumadi Syawal berjudul Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana (KB) Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat di Desa Koto Ranah Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu (Jumadi Syawal, 2019) bertujuan untuk menganalisis jenis-jenis program pemberdayaan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan kampung KB di Desa Koto Ranah sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah untuk mengetahui sejauh mana Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Kampung Keluarga Berkualitas Dalam Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk di Kelurahan Sekip Jaya Kecamatan Kemuning Kota Palembang Sumatera Selatan dimana pada penelitian ini Kampung Keluarga Berkualitas telah mampu membantu menurunkan pertumbuhan penduduk menjadi 14.423 jiwa pada tahun 2023 dari 14.466 jiwa pada tahun 2022.

IV. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Kampung Keluarga Berkualitas Dalam Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk di Kelurahan Sekip Jaya Kecamatan Kemuning Kota Palembang Sumatera Selatan sudah dapat dikatakan dijalankan dengan baik, dimana Kelurahan Sekip Jaya yang terus berkoordinasi dengan dinas maupun pihak terkait dalam mengimplementasikan kebijakan Kampung Keluarga Berkualitas. Dalam melakukan Implementasi Kampung Keluarga Berkualitas

terdapat 2 faktor penghambat, yaitu tidak adanya anggaran khusus serta masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung Kampung Keluarga Berkualitas. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palembang dalam mengatasi faktor penghambat tersebut adalah mencari dana CSR dan menggiatkan sosialisasi lebih aktif.

Keterbatasan Penelitian. Keterbatasan yang terjadi pada penelitian ini adalah waktu yang kurang lama dimana penulis tidak dapat melihat kegiatan Kampung Keluarga Berkualitas di Kelurahan Sekip Jaya.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih banyaknya kekurangan yang terdapat pada penelitian ini. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Kampung Keluarga Berkualitas Dalam Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk di Kelurahan Sekip Jaya Kecamatan Kemuning Kota Palembang Sumatera Selatan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ditujukan kepada Lurah Sekip Jaya beserta jajaran pihak terkait yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Edwards III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly Inc.
- Maruf, Armen dan Dewi Andayani. 2022. *Modul 3 Kampung Keluarga Berkualitas*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan KB Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : ALFABETA.
- Simangunsong, Fernandes. 2016. *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: CV Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.
- Ramadhiani, Eveline. 2022. *Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana (KB) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Kelurahan Kebayoran Lama Utara (Studi Kasus Kampung KB RPTRA Delas)*. (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah). <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/60203>
- Hoeriah, Riski. 2019. *Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana (KB) di Kampung Kaliwadas Kelurahan Lopang Kecamatan Serang Kota Serang Provinsi Banten*. (Skripsi Sarjana, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa). <https://eprints.untirta.ac.id/1454/>

Syawal, Jumadi. 2019. *Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana (KB) Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat di Desa Koto Ranah Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu*. (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau). <https://repository.uin-suska.ac.id/21731/>

BPS Sumatera Selatan. (2024). Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota (Jiwa) 2020-2024.

Mutia Annur, Cindy. (2022). Jumlah Penduduk Indonesia 2015-2022. Databoks.com

Satudata.palembang.go.id. (2023). Jumlah Penduduk Menurut Agama Yang Dianut dan Kelurahan di Kecamatan Kemuning.

